

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH DALAM AUDIT
OPERASIONAL DI KECAMATAN PUUWATU KOTA
KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Salwan Jurdil
NPP. 30.1374

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Kebijakan Publik
Email: salwanjurdil7@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is entitled The Effectiveness of the Implementation of Supervision of the Regional Inspectorate in Operational Audit in Puuwatu District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Southeast Sulawesi Province. Purpose: The purpose of this study is to find out how effective the implementation of supervision of the Regional Inspectorate is in operational audits in Puuwatu District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Method: The research used is method qualitative research descriptive method with an inductive approach. For data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The focus of this research uses Duncan's theory in Steers in measuring the effectiveness which consists of Goal Achievement, Integration, and Adaptation. Results: The results of the study show that the Effectiveness of the Implementation of Supervision of the Regional Inspectorate in Operational Audit in Puuwatu District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province has been going well. Conclusion: Based on the results of interviews with informants and direct observation in the field, the implementation of an operational audit in Puuwatu District conducted by the Regional Inspectorate of Kendari City has been going well in accordance with the applicable rules and SOPs starting from planning, implementation, reporting and evaluation. Suggestions from the author, namely the need to improve Standard Operating Procedures (SOP) for Audit Results Data Tracing Services in order to be able to provide monitoring data services to interested parties and the need for more outreach to the community so that the community can know the benefits of conducting an audit so that the community can help and support the implementation of supervision of government institutions and agencies.*

Keywords: *Operational Audit, Effectiveness, Inspectorate*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam audit operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Fokus penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam Steers dalam mengukur efektivitas yang terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan observasi langsung di lapangan pelaksanaan audit operasional di Kecamatan Puuwatu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Saran dari penulis yaitu perlunya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Penelusuran Data Hasil Audit agar dapat memberikan layanan data hasil pemantauan kepada pihak yang berkepentingan dan Perlunya sosialisasi yang lebih lagi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari diadakannya pelaksanaan audit sehingga masyarakat dapat membantu dan mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga dan instansi pemerintahan.

Kata kunci : Audit Operasional, Efektivitas, Inspektorat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Efektivitas berasal kata efektif yaitu mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dievaluasi dengan berbagai cara dan sangat erat kaitannya dengan efektivitas. Seperti yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya organisasi-organisasi modern yang mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran” (Etzioni dkk, 1985:98).

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja untuk perencanaan desain sistem umpan balik, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya Perusahaan telah digunakan sebagaimana mestinya. dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan (Kadarman, 2001).

Inspektorat Daerah Kota Kendari berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Di mana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses operasional untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan undang-undang.

Efektivitas pengendalian intern sangat penting bagi pelaksanaan manajemen administrasi daerah. Argumen dasarnya adalah bahwa administrasi publik terutama berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2013: 16), sedangkan pengawasan pemerintah daerah ditujukan untuk memastikan bahwa semua lembaga yang

menjalankan fungsi publik benar-benar menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif (Benedek et al. ., 2014: 297).

Faktanya, pengawasan internal masih menjadi masalah di banyak pemerintah daerah di Indonesia. Aparat pengawas belum memiliki integritas dan kapasitas yang cukup, aparat pengawas belum benar-benar mandiri, dan belum memenuhi syarat penggajian aparat pengawas. Lagi pula, fungsi Inspektorat Daerah hanyalah menilai laporan kemajuan dan kecukupan prosedural formal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

semakin besarnya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan berdaya saing di bidang pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kota Kendari harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Perbaikan tersebut harus ditata dalam langkah-langkah yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang didorong oleh pergeseran paradigma dari kesuksesan input menjadi pencapaian keseimbangan antara output dan hasil.

Eksistensi pranata dan hakikat fungsi pengawasan internal memang tak diinginkan dalam sektor publik kita. Secara politik dan hukum, keberadaan lembaga ini bahkan dianggap berbahaya. Hasil inspeksi bisa jadi bumerang kepala daerah menjadi sasaran tembak para lawan politiknya, dan secara hukum berpotensi menjadi pintu masuk bagi kehadiran KPK/kejaksaan untuk menelusuri indikasi pelanggaran pidana. Maka, kalau tidak dibonsai sistematis, pimpinan dan pejabat daerah memainkan politik pembiaran alias dibiarkan “menganggur” lewat aneka cara.

Dari dukungan regulasi dan kelembagaan, sesungguhnya kita terbilang cukup siap pegangan, misalnya, adalah pengaturan soal pengawasan (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005), laporan (PP No.3/2007), evaluasi (PP No.6/2008), sistem pengendalian/SPIP (PP No.60/2008). Bahkan, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hendak memperkuat kerangka legal SPIP ke level UU. Sementara institusi pelaksana, selain BPKP, terdapat Bawasda yang kini bersalin nama menjadi inspektorat daerah.

Tetapi kenyataannya Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi. Lagi pula, fungsi Inspektorat Daerah sekedar menilai laporan kemajuan kerja dan kesesuaian formal-prosedural.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang terkait dalam konteks pengawasan dan audit seperti penelitian dari Nabilah dan Rendy Sueztra Canalldhy (2018) yang berjudul Efektifitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016), menemukan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten OKI terhadap BKD Kabupaten OKI belum terlaksana secara efektif. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat terhadap Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu faktor Internal dan Eksternal. Penelitian dari Nina Trisnawati, Wempy Banga, dan Syamsul ALAM (2018) yang berjudul Analisis Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe juga menjelaskan

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe belum mencapai taraf yang baik. Aparat pengendalian intern belum sepenuhnya menerapkan kriteria pengawasan yang efektif pada semua tahapan pengawasan mulai dari pemeriksaan dan penelaahan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Ada juga penelitian dari Livia Sikmon Putra dan Susi Susanti (2021) yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam artian pemeriksaan, pemeriksaan dan penyidikan tidak berjalan efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yaitu aparatur petugas, ketepatan waktu, Obyektifitas, dan minimnya pengetahuan di bidang terkait.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait audit operasional, selain itu tempat pelaksanaan penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya dan juga lokus dari penelitian ini ditujukan untuk audit operasional di salah satu Kecamatan di Kota Kendari, selain itu Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini lebih kompleks dibanding penelitian sebelumnya sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal dan juga teori yang digunakan penulis dalam Pengukuran Efektifitas yaitu Menurut teori Duncan (dalam Steers 1985) yang dimana berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam audit operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan apa penghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam audit operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaimana Simangunsong (2017:191) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berarti “data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang terdapat dalam rekaman wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari foto, video camcorder, dokumen elektronik pribadi, memo pendukung memo dan catatan resmi lainnya”.

Sehingga peneliti menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari Terhadap Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menentukan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Duncan (dalam Steers 1985) yang memiliki 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah proses menemukan akhir dari tujuan bersama, yang dimana sebelum mencapai tujuan akhir terdapat proses yang harus dilewati. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puuwatu dan Kelurahan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga memperoleh keyakinan memadai bahwa sumber daya yang ada seperti keuangan, aparatur dan aset yang ada telah digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah tindakan spesifik dan langkah-langkah terukur yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu telah mencapai tujuan yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puuwatu dan Kelurahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga memperoleh keyakinan memadai bahwa sumber daya yang ada seperti keuangan, aparatur dan aset yang ada telah digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Hal tersebut diatas dibuktikan dengan dari Laporan Hasil Audit Operasional pada Kecamatan Puuwatu dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.dBulan Mei 2021) terdapat 3 (tiga) temuan yang dimana ketiga temuan tersebut telah di tindaklanjuti oleh objek yang diperiksa dengan adanya bukti Surat Camat Puuwatu nomor 420/85/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal pemberitahuan dan adanya bukti Pertanggung jawaban senilai Rp. 40.476.500. sehingga sasaran untuk mencapai tujuantelah tercapai.



3.2. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan aktivitas dari agenda yang telah disepakati dan melakukan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi mencakup beberapa unsur, yaitu : Sosialisasi adalah proses menumbuhkan atau menyampaikan informasi kepada kelompok, individu atau komunitas. Informasi yang diberikan merupakan konsep yang akan digunakan sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan suatu program. Dimana sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari sudah berjalan, baik itu kepada OPD yg menjadi objek pemeriksaan maupun kepada masyarakat sehingga pada pelaksanaan pengawasan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari hasil pemeriksaan.

3.2.1. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional

Prosedur pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu dilakukan sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan audit diantaranya adalah:

Pertama, tahap persiapan pemeriksaan, yaitu Memberitahukan rencana audit kepada objek. Kemudian mengumpulkan informasi umum tentang objek yang akan diaudit.

Kedua, Pelaksanaan pemeriksaan, Dimulai dengan percakapan pendahuluan dengan kepala objek yang akan diperiksa. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang akurat kepada pimpinan objek pemeriksaan tentang tujuan audit guna memperoleh pemahaman tentang maksud dan tujuan serta manfaat pelaksanaan audit tersebut. Audit dilakukan dengan cara memeriksa berkas, catatan, laporan dan documenter kaitlainnya, kemudian memeriksa, menganalisis, memverifikasi dan memvalidasi data yang diperoleh.

Ketiga, Pelaporan Hasil Pemeriksaan, Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan pemeriksaan (LHP). LHP adalah suatu bentuk penyampaian informasi tertulis tentang hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab Objek yang diperiksa, meliputi dua bentuk: (1) laporan/suratsingkat, (2) laporan bentukpanjang/rincian program.

Keempat, Sebagai bagian dari review ini, subbagian evaluasi dan pelaporan melaporkan kemajuan tindak lanjut rekomendasi LHP yang diberikan oleh auditor, yang dibuktikan dengan penyerahan bukti implementasi rekomendasi objek yang diaudit. Bukti tersebut dapat berupa bukti penyetoran ke kas daerah untuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, setelah itu dibuatkan laporan tindak lanjut pembayaran.

3.3. Adaptasi

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu dipengaruhi dari kualitas kemampuan auditor dilapangan. Selain itu sarana dan prasarana menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu.

3.3.1. Kualitas Kemampuan Auditor

Peningkatan kemampuan auditor sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit. Berdasarkan hasil wawancara dapat kita lihat sebelum melakukan

pemeriksaan, auditor wajib mengikuti diklat sebagai peningkatan kemampuan dalam melakukan audit. Selain itu, auditor juga melaksanakan kunjungan ke pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Harapannya, kemampuan auditor dapat meningkat dalam pelaksanaan audit.

3.3.2. Sarana dan Prasarana

faktor keberhasilan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu yaitu karena terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang proses audit operasional di Kecamatan Puuwatu.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi dimana dalam pelaksanaannya sudah berjalan secara efektif mulai dari tujuan dan sasaran, prosedur pelaksanaan audit, kualitas kemampuan auditor, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu tidak ada, tetapi secara umum pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari terkadang mengalami hambatan yaitu keterbarasan anggaran, sarana kendaraan operasional, kurangnya data fisik lapangan, dan seringnya terjadi mutasi. Berbeda dengan ketiga penemuan sebelumnya yang menemukan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah belum mencapai taraf yang baik. Aparat pengendalian intern belum sepenuhnya menerapkan kriteria pengawasan yang efektif pada semua tahapan pengawasan mulai dari pemeriksaan dan penelaahan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Selain itu penelitian sebelumnya menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yaitu aparatur petugas, ketepatan waktu, Obyektifitas, dan minimnya pengetahuan di bidang terkait.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Kendari dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan audit tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sudah terlaksana dengan baik terlihat dari pelaksanaannya yang sudah berjalan dengan baik dan efektif yang dimana memenuhi 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
2. yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu tidak ada, tetapi secara umum pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari terkadang mengalami hambatan berupa : keterbatasan anggaran, sarana kendaraan operasional, kurangnya data fisik lapangan, dan adanya pergantian atau mutasi jabatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan pelaksanaan penelitian yang kurang tepat yaitu tidak dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan audit operasional di kecamatan puuwatu sehingga penulis kekurangan data observasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan dengan memperluas objek yang diteliti sehingga menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektorat Daerah dan camat Kecamatan Puuwatu Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alam, Syamsul, 2013. *Belanja Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Sulawesi Tenggara*. Disertasi doktor bidang Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Amitai, Etzioni, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, UI Press, Jakarta.

Benedek, Mária, Klára Tubak Szenténé, Dániel Béres, 2014. *Internal Controls in Local Governments*. *Public Finance Quarterly*, 2014/3, pp. 296-309.

Fernandes Simangunsong, 2017, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung:Alfabeta.

Kadarisman. (2013). *Manajemen pengembangan sumber daya manusia*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Steers, Richard M. 1985. *Evektivitas Organisasi (kaidah perilaku)*, Jakarta : Airlangga. Strong,

C.F, 1951, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited,London.

B. Karya Ilmiah

Nina Trisnawati, dkk. (2018). “*analisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di kabupaten konawe*”, *Jurnal administrasi pembangunan dan kebijakan publik*. Volume 9, Nomor 2.

Nabilah dan Rendy Sueztra Canalldhy. (2018) “*efektivitas fungsi pengawasan inspektorat terhadap kinerja pegawai (studi kasus badan kepegawaian dan diklat kabupaten ogan komering ilir tahun 2016)*”, *jurnal pemerintahan dan politik* volume 3 no 1

Livia Sikmon Putra dan Susi Susanti, (2021) “*efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di inspektorat daerah kabupaten kerinci*”, e-journal al-dzahab vol 2 (2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

D. Internet

<https://www.kppod.org/berita/view?id=389> diakses pada 15 Oktober 2022

<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas> diakses pada 15 Oktober 2022